

AKUNTABILITAS KINERJA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Andi Tenri¹, Risal Said^{2*}, Zainul Abidin³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Administrasi Negara, PPS, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

*Korespondensi: danamon147@gmail.com

Citation (APA):

Tenri, A., Said, R., & Abidin, Z. (2025). Akuntabilitas Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 270–281. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.3925>

Email Authors:

anditenri@unidayan.ac.id
danamon147@gmail.com
zainulabidin180@gmail.com

Submitted: 04 Desember, 2024

Accepted: 20 Januari, 2025

Published: 30 Juni, 2025

Copyright (c) 2025 Andi Tenri, Risal Said, Zainul Abidin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan, dengan merujuk pada empat indikator utama: perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan data kinerja. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Selatan dengan 8 informan dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola stunting. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja percepatan penurunan stunting belum optimal. Penetapan perencanaan strategik belum sepenuhnya mengintegrasikan upaya penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang sesuai. Pengukuran kinerja tidak sepenuhnya mencakup intervensi spesifik dan sensitif dengan capaian yang masih rendah. Pelaporan kinerja belum dilaksanakan secara periodik dan tepat waktu, dan pemanfaatan data kinerja juga belum sepenuhnya digunakan untuk perencanaan dan penganggaran periode berikutnya.

Kata kunci: Akuntabilitas_Kinerja; Percepatan_Penurunan_Stunting

ABSTRACT

This study aims to describe performance accountability in accelerating stunting reduction in South Buton District, concerning four main indicators: strategic planning, performance measurement, performance reporting, and utilization of performance data. Using a qualitative method with a descriptive approach, this research was conducted in South Buton District with 8 informants from Regional Apparatus Organizations that manage stunting. Data were collected through interviews and documentation, while data analysis was done by data presentation, reduction, and conclusion drawing. The results showed that performance accountability for accelerating stunting reduction was not optimal. Strategic planning has not fully integrated stunting reduction efforts in planning documents and appropriate budget allocations. Performance measurement does not fully cover specific and sensitive interventions with low achievements. Performance reporting has not been carried out periodically and on time, and performance data has also not been fully used for planning and budgeting for the next period.

Keywords: Performance_Accountability, Acceleration_of_Stunting_Reduction

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Stunting adalah masalah yang sangat serius karena dampak jangka pendek dan panjangnya. Dalam jangka pendek, stunting dapat meningkatkan risiko kematian dan kerentanan terhadap infeksi. Selain itu, stunting dapat menyebabkan perkembangan motorik, kognitif, dan kemampuan bahasa yang terhambat (WHO, 2013). Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat menyebabkan stunting lintas generasi, di mana anak-anak dengan stunting cenderung memiliki anak yang juga memiliki risiko yang sama. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terkena berbagai masalah kesehatan jangka

panjang, seperti penyakit tidak menular yang baru muncul saat dewasa. Stunting dapat berdampak negatif pada sistem kesehatan dan ekonomi dalam jangka panjang karena meningkatkan prevalensi diabetes, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular (Trihono et al., 2015).

Stunting merupakan kondisi keterlambatan pertumbuhan pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari data Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (2022). Kekurangan gizi pada fase kritis ini dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan potensi mereka di masa depan. Selain mempengaruhi aspek fisik pertumbuhan, stunting juga berdampak pada sistem kekebalan tubuh anak, mengurangi kemampuan belajar, serta meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit di masa depan.

Defisiensi gizi dan paparan infeksi berulang menyebabkan pertumbuhan yang terhambat pada anak. Pola asuh yang buruk, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), memengaruhi kedua komponen ini. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena ketidakmampuan untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan dan sanitasi. Apabila panjang atau tinggi anak berada di bawah batas normal yang ditetapkan dalam standar pertumbuhan nasional, anak dikategorikan mengalami stunting. Batas-batas ini menunjukkan gangguan dalam pencapaian potensi pertumbuhan fisiologis anak (Bappenas, 2018).

Untuk menghindari efek negatif jangka panjang, seperti keterlambatan perkembangan anak, penanggulangan stunting harus dimulai sejak dini. Stunting dapat menghambat pengoptimalan kecerdasan anak karena mempengaruhi perkembangan otak mereka. Karena keterbatasan kognitif dan fisik yang terbentuk sejak usia dini, dampak ini berisiko mengurangi produktivitas mereka di masa dewasa. Anak-anak yang stunting juga lebih rentan terhadap berbagai penyakit dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengidap penyakit kronis di masa depan. Selain itu, stunting dan masalah gizi lainnya diperkirakan dapat berkontribusi pada penurunan 2% hingga 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan, yang menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan dari masalah kesehatan ini (Bappenas, 2018).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk masa 2020-2024, dalam upaya memperbaiki kondisi gizi anak dan meningkatkan kualitas SDM di masa depan, pemerintah menetapkan target untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia hingga mencapai 14%. Pencapaian target ini memerlukan keterlibatan berbagai sektor dan memastikan bahwa program sinkronisasi di tingkat desa dan nasional (Bappenas, 2018). Untuk mencapai target tersebut, beberapa kabupaten, kota, dan desa ditetapkan sebagai wilayah prioritas. Area-area ini akan secara bertahap berkembang hingga mencakup semua kabupaten dan kota di Indonesia, memastikan bahwa intervensi penurunan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif di seluruh wilayah tersebut (Bappenas, 2018).

Kabupaten Buton Selatan memiliki tingkat stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara, dengan 45,2%, menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka Provinsi Sulawesi Tenggara yakni sebesar 30,2%. Sedangkan data SSGI tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan menjadi sebesar 32,6%, namun masih lebih tinggi dari rata-rata angka Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 27,7%. Pada tahun 2023 meningkat lagi

menjadi 37,1 % dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata angka prevalensi Sultra yaitu sebesar 30% serta Kabupaten Buton Selatan menempati urutan kedua tertinggi dari 17 Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi tenggara (Kemenkes RI, 2023). Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Buton Selatan.

Peraturan ini menetapkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk mencapai status bebas stunting pada tahun 2024. Ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun yang sama. Untuk menerapkan strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan meluncurkan Program Bapak Asuh Anak Stunting. Program ini bertujuan untuk menangani stunting secara langsung dan terarah. Salah satu tujuan dari program yang dilaksanakan oleh SKPD adalah untuk segera mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan. Dengan demikian, Kabupaten Buton Selatan akan mencapai status stunting bebas. Meskipun upaya telah dilakukan, hasil yang diinginkan belum tercapai. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada tahun 2021 mencapai 45,2%, turun menjadi 32,6% pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 37,1% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum cukup berhasil.

Pada tahun 2022 berdasarkan keputusan Bupati Buton Selatan nomor 170 menetapkan lokus prioritas pencegahan stunting sebanyak 29 desa pada tahun 2023 dijadikan sebagai sasaran fokus pencegahan dan penanganan stunting oleh semua *stakeholder* dan organisasi perangkat daerah baik spesifik maupun sensitif. Penetapan daerah tertentu sebagai desa lokus didasarkan sebagai hasil dari analisis situasi. Hasil ini sangat penting dan berfungsi sebagai dasar untuk membuat dan menerapkan program. Diharapkan bahwa SKPD yang relevan dapat menemukan masalah yang memengaruhi prevalensi stunting di setiap desa lokus yang berkaitan dengan layanan mereka, tetapi tidak semua SKPD menjadikan lokus stunting sebagai intervensi. Beberapa indikator kinerja cakupan layanan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten buton selatan belum sepenuhnya juga dilaksanakan oleh SKPD pengampu stunting.

Rencana kegiatan stunting dianggap sebagai tindakan konkret yang diambil oleh kabupaten/kota untuk menerapkan rekomendasi dari analisis situasi. Untuk memperluas cakupan intervensi dan meningkatkan koordinasi antara kabupaten, kota, dan desa/kelurahan dalam pelaksanaan intervensi pada tahun berjalan atau periode yang akan datang, rencana ini mencakup program dan aktivitas yang dirancang oleh OPD. Rencana kegiatan tersebut kemudian dimasukkan oleh pemerintah kabupaten/kota ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Operasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai bagian dari perencanaan tahunan yang lebih luas. Namun, studi pendahuluan telah menunjukkan bahwa proses perencanaan yang diperlukan untuk intervensi stunting belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar untuk pembuatan dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting. Masih adanya program kegiatan yang di rencanakan namun pada kenyataannya belum sepenuhnya mengenai sasaran yang ada pada desa lokus, kegiatan yang dilaksanakan masih berorientasi pada rapat dan perjalanan dinas.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi stunting periode 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan aksi. Penyusunan rencana

kegiatan belum sesuai dengan rekomendasi hasil analisis situasi, Indikator kinerja percepatan penurunan prevalensi stunting yang belum sepenuhnya di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini SKPD pengampu stunting, disamping itu juga penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi tidak tepat waktu serta data dan laporan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan priode berikutnya.

Penelitian terkait penanganan stunting yang dilakukan oleh Hisanuddin et al (L. O. S. I. Hisanuddin et al., 2023), (L. O. F. A. Hisanuddin et al., 2023) Tenri & Abidin (Tenri & Abidin, 2023), Prasetyani et al (Prasetyani et al., 2024), Hasnawati et al (Hasnawati, Syahril Ramadhan, 2023), di mana kajian yang biasanya dilakukan mencakup masalah yang sedang terjadi saat melakukan percepatan penurunan stunting. Namun, sedikit penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan upaya untuk mencapai tujuan dengan tujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Maemunah et al, 2024), menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Buton Selatan yang melibatkan informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah pengampu stunting. Dalam kedua pendekatan pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi digunakan. Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari orang-orang yang relevan dengan penelitian mereka, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian. Dokumentasi, di sisi lain, mengumpulkan data tertulis atau visual dari sumber-sumber yang sudah tersedia, seperti laporan, arsip, dokumen resmi, atau materi lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam serta memberikan validasi untuk hasil penelitian (Moleong, 2000), sedangkan untuk analisis data melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang akuntabilitas kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan dengan mengacu pada Teori Sjahrudin Rasul (Rasul, 2003) diperoleh dari penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, laporan kinerja, dan pemanfaatan kinerja. Halini dapat diuraikan sebagai berikut:

Penetapan Perencanaan Strategik

Tahapan krusial dalam pencapaian tujuan organisasi adalah perencanaan. Perencanaan yang terstruktur dan matang akan mengarahkan organisasi menuju jalur yang benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah pertama dalam proses perencanaan untuk melaksanakan aksi konvergensi adalah melakukan analisis situasi secara menyeluruh. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang paling tinggi, jumlah kasus stunting yang signifikan, serta cakupan layanan intervensi yang masih terbatas. Dengan informasi yang diperoleh dari analisis situasi ini, organisasi dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi angka stunting di wilayah yang paling membutuhkan.

Hasil analisis terhadap dokumen penyusunan Rencana Kegiatan dari Form 2.1 Web Aksi Bangsa tahun 2023 menunjukkan bahwa Rencana Kegiatan Konvergensi dalam percepatan penurunan prevalensi stunting pada Kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kegiatan Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam hal uraian kegiatan maupun target capaian pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa pada Form 1.3 terdapat permasalahan dan rekomendasi atas 64 indikator intervensi spesifik dan sensitif, namun tahun 2023 hanya terdapat 47 program kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan serta rekomendasi atas pelaksanaan intervensi spesifik, sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel I: Kesesuaian Rekomendasi Ansit dengan Rencana Kegiatan tahun 2023

Uraian Kegiatan	Jumlah Indikator (2023)
Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitif	64
Permasalahan dan rekomendasi	64
Rencana kegiatan	47
Rekomendasi yang terintegrasi terhadap rencana kegiatan	43

Sumber: Data Olahan Master Ansit, Bappeda Kab Buton Selatan, 2023

Selanjutnya Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Buton Selatan dari 2 program kegiatan yang di intervensi hanya 9 desa lokus stunting dari 29 desa lokus stunting yang ditetapkan pada thun 2023.

Tabel berikut memperlihatkan kesesuaian lokus stunting dengan pemetaan program kegiatan pada Dinas PUPR:

Tabel II: Kesesuaian Lokus Stunting dengan Rencana kegiatan PUPR Tahun 2023

Program / Kegiatan	Indikator	Kesesuaian Lokus Stunting	Lokus Stunting
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	1 Desa yang sesuai lokus	29 Desa Lokus
Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	8 desa yang sesuai lokus	29 Desa Lokus

Sumber: Web Bina Bangsa Kemendagri (Bappeda Kab. Buton Selatan, 2023) dan SIPD 2023 (KEMENDAGRI, 2023)

Hasil menunjukkan bahwa di desa lokus prioritas penanganan stunting, sebagian besar program yang direncanakan tidak dilaksanakan. Analisis situasi dan penetapan desa lokus tidak digunakan sebagai dasar dalam menyusun program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pengampu stunting. Sehingga dalam hal ini pemerintah kabupaten Buton Selatan belum sepenuhnya mengintegrasikan perencanaan

percepatan penurunan prevalensi stunting dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif belum sepenuhnya tepat sasaran.

Temuan ini sesuai dengan penelitian (UNICEF, 2013) yang menekankan bahwa penanganan stunting membutuhkan pendekatan multisektor yang berfokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Ketidaksiharian antara program yang direncanakan dengan hasil analisis situasi menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya fokus pada kebutuhan utama masyarakat.

Pengalaman global menunjukkan bahwa penentuan desa atau kelurahan sebagai lokasi utama untuk memfokuskan program intervensi sangat vital dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting. Strategi penentuan lokus ini telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Kamboja, untuk mengurangi stunting secara efektif. Antara tahun 2000 dan 2014, prevalensi stunting di Kamboja berhasil menurun sebesar 17%, berkat program intervensi gizi yang diarahkan secara spesifik kepada kelompok masyarakat yang memiliki skor HAZ (height-for-age z scores) di bawah rata-rata. Pendekatan ini terbukti efektif karena memungkinkan program untuk menjangkau kelompok yang paling rentan, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan dengan cakupan yang lebih tinggi.

Selain isu terkait pemilihan desa lokus yang bukan sasaran utama program, terdapat berbagai tantangan lain yang berhubungan dengan proses perencanaan. Salah satu komponen yang sangat krusial dalam mencapai penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan adalah perencanaan alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang tepat dan efisien menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program intervensi yang ditujukan untuk menurunkan angka stunting. Tanpa perencanaan anggaran yang baik, upaya penanggulangan stunting akan terbatas oleh kendala keuangan yang menghambat pelaksanaan program secara maksimal. Dari hasil temuan masih ditemukan alokasi anggaran untuk intervensi spesifik dan sensitif belum sepenuhnya tepat sasaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (World Bank Group, 2018) yang menekankan bahwa keberhasilan program penanganan stunting bergantung pada alokasi anggaran yang tepat sasaran. World Bank menyebutkan bahwa anggaran harus difokuskan pada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi untuk memberikan dampak yang signifikan.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran adalah istilah yang mengacu pada upaya untuk melaksanakan rencana. Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program masing-masing SKPD dan kepuasan masyarakat penerima layanan.

Tabel III: Capaian Indikator Cakupan layanan Esensial tahun 2023

Indikator	Target	Capaian (%)
Remaja perempuan yang minum tablet tambah darah (TTD)	58 %	74.65
Anak perempuan muda yang menjalani pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90%	46,53

Calon ibu atau calon pengantin yang menerima obat penambah darah (TTD)	90%	51,88
Calon pasangan usia subur (PUS) yang menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanan kesehatan untuk pernikahan	90%	50,44
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pendampingan kesehatan reproduksi dan instruksi gizi sejak tiga bulan sebelum pernikahan	90%	50,44
Pasangan calon pengantin yang menerima materi pencegahan stunting selama bimbingan perkawinan	90%	Na
Pasangan Usia Subur (PUS) yang miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan finansial bersyarat	90%	Na
Pasangan Usia Subur (PUS) yang miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90%	Na
Pasangan Usia Subur (PUS) yang miskin atau tidak mampu dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90%	66,5
Ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK) yang memerlukan lebih banyak nutrisi	90%	70,47
Sebagian besar ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) setidaknya sembilan puluh tablet selama kehamilan	80%	72,46
Persentase kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi	7,4%	Na
Persentase Kehamilan non perencanaan	15,5%	Na
Bayi kurang dari enam bulan hanya diberi susu ibu (ASI).	80%	44,91
Anak-anak berusia 6 hingga 23 bulan yang menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80%	74,33
Anak-anak gizi buruk berusia di bawah lima tahun yang menerima pelayanan tata laksana gizi buruk	90%	72,75
Anak-anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang melacak pertumbuhan dan perkembangan mereka	90%	76,90
Anak-anak berusia di bawah lima tahun, atau balita, membutuhkan lebih banyak nutrisi.	90%	71,31
Balita yang mendapatkan vaksinasi dasar lengkap	90%	84,51
Persentase keluarga yang memutuskan untuk menghentikan pembuangan air besar sembarangan (BABS)	90%	96,84
Jumlah keluarga yang mengikuti Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70%	49,73
Dalam negeri, konsumsi ikan meningkat,	90%	62,89

meningkatkan risiko stunting keluarga		
Perawatan Keluarga Berencana (KB) setelah melahirkan	70%	Na
Cakupan keluarga yang berisiko stunting yang menerima bantuan	90%	Na
Sumber daya pekarangan meningkatkan asupan gizi keluarga yang berisiko stunting.	50%	2,91
Rumah tangga yang memiliki air minum yang layak	100%	96,09
Rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak	90%	77,86
Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) menggunakan modul kesehatan	90%	94,27
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima bantuan pangan yang berbeda selain beras dan telur	90%	60

Sumber: Bappeda Kab. Buton Selatan, Web Bina Bangda Kemendagri (Bappeda Kab. Buton Selatan, 2023)

Berdasarkan hasil temuan capaian kinerja penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan indikator capaian intervensi spesifik dan sensitif. Data yang diperoleh dari laporan kinerja OPD yang telah diinput dalam aksi web bina bangda Kemendagri, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, ditemukan bahwa pengukuran kinerja indikator intervensi belum berjalan optimal.

Capaian kinerja Kabupaten Buton Selatan berada pada posisi yang terpaut jauh dari target pencapaian dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (StraNas Stunting) (Kemensetneg RI/Sekretariat Wapres, 2024). Berdasarkan kebijakan nasional, intervensi spesifik dan sensitif harus mencapai cakupan minimal 80% di desa lokus agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka stunting.

Temuan ini konsisten dengan studi UNICEF (United Nations Children's Fund, 2020) yang menekankan bahwa kegagalan dalam meningkatkan cakupan intervensi spesifik dan sensitif akan memperlambat upaya penurunan stunting, terutama di wilayah yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja yang seharusnya disusun secara berkala sering terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman nasional. Laporan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang seharusnya disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan: 1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli; dan 2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Januari.

Berdasarkan laporan rapat koordinasi TPPS Kabupaten Buton Selatan tentang kebutuhan penyusunan Laporan TPPS Kabupaten semester I dan II Tahun 2023, menunjukkan bahwa rapat tersebut

baru dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023. Sehingga penyusunan Laporan TPPS Kabupaten Semester I 2023 terlambat begitu pula dengan Laporan TPPS semester II.

Berdasarkan hasil temuan tersebut pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan, ditemukan bahwa pencatatan dan pelaporan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) belum dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini menghambat proses monitoring dan evaluasi program stunting di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kinerja TPPS yang tidak tepat waktu dan tidak teratur bertentangan dengan pedoman umum TPPS yang mengharuskan pelaporan dilakukan secara periodik dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Temuan ini sejalan dengan penelitian UNICEF (United Nations Children's Fund, 2020) yang menekankan bahwa salah satu faktor yang menghambat efektivitas penanganan stunting adalah kurangnya konsistensi dalam pelaporan data dari tingkat desa ke tingkat kabupaten.

Pemanfaatan Informasi Kinerja

Berdasarkan hasil analisis rencana kegiatan perbaikan data pada Aksi 6 dan rencana kegiatan dari Aksi 2, diketahui bahwa dari semua rencana kegiatan perbaikan data pada Form 6.3 tahun 2022, terdapat lima rencana kegiatan perbaikan yang belum menjadi bagian dari rencana kegiatan pada Form Aksi 2.1 tahun 2023 baik untuk tahun berjalan maupun tahun rencana, sebagaimana tersaji pada Tabel IV.

Tabel IV: Rencana Kegiatan Perbaikan Data Tahun 2022
Yang Belum Masuk pada Rencana Kegiatan OPD Tahun 2023

Indikator	Rencana Kegiatan Perbaikan (Form 6.3 Tahun 2022)	Rencana Kegiatan (Form 2.1 Tahun 2023)
Keluarga prasejahtera yang menerima berbagai jenis bantuan pangan selain beras dan telur	Verifikasi dan validasi data	Tidak ada
Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Verifikasi dan validasi data serta pengusulan Bansos	Tidak ada
Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Verifikasi dan validasi data DTKS	Tidak ada
Persentase ibu hamil yang mengalami Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang menerima upaya kesehatan	Pendataan ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat dimaksimalkan pelaporannya	Tidak ada
Persentase keluarga yang memiliki risiko stunting yang menerima KIE interpersonal sesuai dengan standar	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kader BKB	Tidak ada

Sumber: Form 6.3 Tahun 2022 dan Form 2.1 Tahun 2023 Web Aksi Bangda (Bappeda Kab. Buton Selatan, 2023)

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan delapan aksi konvergensi stunting periode 2023 dan menginput kegiatannya ke Web Aksi Bangda. Namun masih terdapat beberapa data indikator percepatan penurunan prevalensi stunting yang belum bisa disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan hingga batas waktu penginputan data ke dalam aplikasi pada 31 Desember 2023 dan terdapat rencana kegiatan perbaikan sistem data yang tidak dimasukkan kedalam rencana kegiatan OPD teknis yang diinput pada Form Aksi 2 sehingga otomatis tidak dapat dihitung capaiannya pada pelaksanaan reviu kinerja di Aksi 8.

Berdasarkan hasil temuan pada perencanaan dan penganggaran program penanganan stunting di Kabupaten Buton Selatan, ditemukan bahwa data kinerja stunting belum sepenuhnya digunakan sebagai referensi saat membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pengalokasian anggaran pada periode berikutnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kinerja stunting dalam perencanaan dan penganggaran belum sesuai dengan prinsip evidence-based planning yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Hasil ini sejalan dengan pemaparan Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian PPN/BAPPENAS RI, 2020) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam percepatan penurunan stunting adalah kurangnya integrasi data kinerja dalam perencanaan dan penganggaran, yang menyebabkan intervensi kurang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Dari analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa empat pendekatan indikator akuntabilitas kinerja percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan, yaitu penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan data kinerja, belum dapat dipertanggungjawabkan secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa faktor: pertama, perencanaan strategik belum sepenuhnya mengintegrasikan program percepatan penurunan prevalensi stunting dalam dokumen perencanaan dan anggaran untuk intervensi yang spesifik serta sensitif sesuai dengan kebutuhan. Kedua, dalam pengukuran kinerja, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif masih belum memadai, hal ini tercermin dari adanya nilai Na (data tidak tersedia) pada beberapa indikator dan capaian layanan yang masih rendah. Ketiga, pelaporan kinerja belum dilaksanakan secara konsisten, baik dalam hal pencatatan maupun pelaporan yang periodik dan tepat waktu. Keempat, pemanfaatan informasi data kinerja juga belum optimal, karena data tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk merumuskan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan, diperlukan untuk mengintegrasikan program ke dalam perencanaan dan anggaran, memperbaiki pengukuran kinerja dengan data yang lengkap, meningkatkan pelaporan yang konsisten, dan mengoptimalkan pemanfaatan data kinerja untuk perencanaan serta penganggaran yang lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kab. Buton Selatan. (2023). *Capaian Indikator Cakupan layanan Esensial tahun 2023*. Web Bina Bangda Kemendagri. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/auth/login>
- Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kota*. Bappenas.
- Hasnawati, Syahril Ramadhan, L. O. S. I. H. (2023). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Baubau. *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 103–115.
- Hisanuddin, L. O. F. A., La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin La Ode Farid Akhyar Hisanuddin, R. A., & Andriani, R. (2023). Model Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Buton Selatan. *Aceh Nutrition Journal*, 455–465.
- Hisanuddin, L. O. S. I., Andriani, R., & Hisanuddin, L. O. F. A. (2023). *Konvergensi Kebijakan Penanggulangan Stunting*. Deepublish.
- Huberman, M. B. M. & A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- KEMENDAGRI. (2023). *SIPD Kabupaten Buton Selatan*. <https://sipd.kemendagri.go.id/landing>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023*.
- Kemensekret RI/Sekretariat Wapres. (2024). *Stranas Stunting: STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING)*.
- Kementerian PPN/BAPPENAS RI. (2020). *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2020-2024*.
- Maemunah et al. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Teori*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Prasetyani, R., Tenri, A., & Asmidin. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Stunting di Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 6(3).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, (2021).
- Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. (2022). Pentingnya Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Diakses dari <https://cfns.ugm.ac.id/2022/10/24/pentingnya-seribu-hari-pertama-kehidupan-1000-hpk/>
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Problem dan Solusi Sistem Penganggaran di Indonesia*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Tenri, A., & Abidin, Z. (2023). Environmental Aspects Policy In Implementation of Stunting Prevention in Buton Selatan District. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 11(2).
- Trihono, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Utami, N. H., Tejayanti, T., & Nurlinawati, I. (2015). *PENDEK (STUNTING) DI INDONESIA, MASALAH DAN SOLUSINYA*. Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- UNICEF. (2013). *Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress*. <https://data.unicef.org/resources/improving-child-nutrition-the-achievable-imperative-for-global->

progress/

United Nations Children's Fund. (2020). *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*. UNICEF Indonesia.

WHO. (2013). Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences WHO Conceptual Framework. *WHO*, 9(2), 27–45.

World Bank Group. (2018). *Indonesia Percepat Tindakan Melawan Stunting*. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2018/06/26/indonesia-fights-stunting-commitment-convergence-and-communities>.

PROFIL SINGKAT

Risal Said, Tempat Kelahiran Bataraguru, tanggal 01 Mei 1984, saat ini sedang menyelesaikan jenjang S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau dan akan lulus tahun 2024.